

DAFTAR PUSTKA

Buku/Jurnal

- Bobi, 2002. *Modul Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan, Kelembagaan dan Peraturan*. Yogyakarta: Magister Perencanaan Kota dan Daerah. UGM.
- Burham, Peter, Karin Giliand, Wyn Gran dan Zig Layton-Henry.2004. *Research Methods in Politics*. England: Macmillan
- Herbarina dan Sina. 2013. *Eksistensi Tanah Grand Sultan Di Wilayah Kerajaan Gunung Tabur Dalam Sudut Pandang Hukum Adat*. *Jurnal Beraja Niti* Vol. 2, No. 10, 2013
- Huda. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Huda. 2014. *Desentralisasi Asimetrik Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media.
- Lutfi, Dkk.2009. *Keistimewaan Yogyakarta yang diingat dan yang dilupakan*.Yogyakarta: STPN
- Lutfi, 2015. *Politik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: fh@uii.ac.id
- Moleong, L. J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nirmalasari, Rarasati (2014) *Penyalahgunaan Hak Pinjam Pakai Atas Sultan Grond Oleh Masyarakat Kecamatan Karaton*. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial. <http://eprints.uny.ac.id/18554/>
- North, North D.C.Institutions, 1990. *Institutional Change And Economic Performance*. Cambridge University Press
- Pratama, Dkk.2013. *Kajian Tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta*. *Jurnal Diponegoro law review* Vol. 1, No.2, 2013
- Rahmawati, Dian Eka. 2010. *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Labotorium IP UMY
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Taira Wacana

- Sukisno. 2014. *Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Grond) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada: 2014
- Scott, W.R. *Institutions and Organizations (Ideas and Interest) Thisrd Edition*, (Stanford University: sage Publications, 2008), hlm 48
- Umar. 2006. *Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) yogyakarta setelah Berlakukanya UU No. 5/ 1960*
- Wibawanti dan Harjiyatni.2008. *Pemberian Hak Dalam Pemanfaatan Tanah Pesisir Pantai Untuk Transmigrasi Ring I Di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Mimbar Hukum Vol.2,No.1. (Februari 2008)
- Wiryanto,F.1986. *Membangun Masyarakat*, Bandung: Alumni. diakses 7 juni 2015 <http://news.okezone.com>
- Kompas, 2011. “*Monarki Yogyakarta” Inkonstitusional ?*: Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara

Peraturan-Peraturan

- ❖ **Regulasi Nasional**
 - Keputusan Presiden RIN Nomor 33 Tahun 1984 pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) di DIY
 - UU No 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah
 - Pasal 10 ayat (1,3) bahwa UU No 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan dari pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya
 - Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang pembentukan BPN

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan antara Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY.

❖ Regulasi Pemerintah Daerah DIY

- Perda No 3 tahun 1984 tentang pengelolaan tanah di DIY
- Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY.
- Perda DIY Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2015
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2014
- Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor 590/3298/Ro.I/TIM/2014 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Lembaga Pertanahan Karaton dan Pakualaman.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2015 membentuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY tujuan mengelola SG dan PAG.

❖ Regulasi Kasultanan Yogyakarta

- Traktat Surat perjanjian Sultan HB IX tanggal 18 Maret 1940; Pasal 25 ayat (1) ,(2),(3) mengenai Rijksblad/Lembaran Kerajaan Berisi Peraturan Sultan Berlaku Mengikat bagi penduduk dan Kasultanan
- Rijksblad Van Djojakarta/ Lembar Kerajaan Kasultanan No. 16 Tahun 1918 ,Cap Nama Sultan pada tanggal 8 Agustus 1918 adalah Sultan HB VII dalam bahasa Belanda disusun dalam Pasal demi Pasal
- Surat UU Rijksblad/Lembar Kerajaan Kasultanan No. 16 Tahun 1918, diperintahkan di Istana Yogyakarta Cap Nama Raja pada tanggal 8 Agustus adalah Sultan HB VII dalam bahasa huruf jawa disusun dalam Bab demi Bab

- Surat UU Rijksblad/ Lembar Kerajaan Kasultanan No.23 Tahun 1925, diperintahkan di Yogyakarta, Cap Nama Sultan HB VIII
- Surat UU Rijksblad/ Lembar Kerajaan Kasultanan No. 11 Tahun 1928, diperintahkan di Yogyakarta, Cap Nama Sultan HB VIII.

Webside/Koran

Hasil Pemetaan Tanah Sultan Tahun 2005 (*Harian Jogja, Jumat 6 September 2013*)

Mengenal Daerah Istimewa Yogyakarta (<http://id.images.search.yahoo.com> di akses bulan Februari 2016)

Peta Karaton Yogyakarta Sumber: (<http://yosuketop1.blogspot.co.id/2010> di akses Februari 2016)

Struktur Organisasi BPN DIY (<http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Struktur-Organisasi-Pejabat/Kantor-Wilayah-Badan-Pertanahan-Nasional> di Akses Maret 2016)

Perbandingan Jumlah kepemilikan tanah antara laki-laki dan Perempuan di Indonesia pada Tahun 2014 (<http://www.bpn.go.id/#> diakses Maret 2016)

Model Pelayanan BPN dari Tingkat Pusat sampai Desa (<http://www.bpn.go.id/#>) diakses Maret 2016

Peta Tanah Kasultanan di Kota Yogyakarta (<http://pertanahan.jogjaprov.go.id/> diakses Maret 2016)

Pengklaيمان Atas Tanah (Jawa Post, Jumat 13 November 2015).

Acara-Acara

- Peneliti mengikuti Rapat Koordinasi terkait temuan Ombudsman di DIY
- Peneliti Mengikuti Pembahasan RAPERDA KEBUDAYAAN di DPRD Provinsi DIY
- Peneliti Mengikuti Pembahasan RAPERDA PERTANAHAN di DPRD Provinsi. DIY